

TRANSFORMASI ISLAM POLITIK ERA REFORMASI

**(Studi terhadap Pendidikan Politik PKB Tahun 1998 - 2008
di Kabupaten Probolinggo Jatim)**



Oleh:
Zuhri Humaidi
NIM: 06.234.391

TESIS

**Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Studi Islam**

**YOGYAKARTA
2010**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Zuhri Humaidi, SHI.
NIM : 06.234.391
Program : Magister
Prodi : Hukum Islam
Konsentrasi : Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam

Menyatakan bahwa tesis saya secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 12 April 2010

Saya yang menyatakan

Zuhri Humaidi, SHI.
06.234.391

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yang Terhormat
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan ini disampaikan, bahwa setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi atas naskah tesis yang berjudul:

TRANSFORMASI ISLAM POLITIK ERA REFORMASI (*Studi terhadap Pendidikan Politik PKB Tahun 1998-2008 di Kabupaten Probolinggo, Jatim*)

Yang ditulis oleh:

Nama : Zuhri Humaidi, SHI.
NIM : 06.234.391
Program : Magister (S2)
Prodi : Hukum Islam
Konsentrasi : Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam

saya berpendapat bahwa tesis tersebut di atas sudah dapat diajukan kepada program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Magister Studi Islam.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 12 Maret 2010

Pembimbing

Prof. Dr. H. Iskandar Zulkarnain

ABSTRAK

Pasca reformasi 1998, PKB muncul sebagai salah satu partai yang memperoleh reputasi luas. Hal itu paling tidak disebabkan dua hal pokok, yaitu perolehan suaranya yang cukup signifikan pada Pemilu 1999 dan 2004 serta kehadirannya sebagai partai politik yang muncul dari rahim NU, organisasi muslim terbesar di Indonesia yang sejak 1984 keluar dari percaturan politik praktis. Yang menarik, berbeda dengan NU tahun 1940-an s/d 1970-an, ketika aktif berkiprah dalam politik praktis, yang jelas mengusung agenda formalisasi Islam dalam kehidupan kenegaraan, PKB berupaya mensintesis unsur keislaman dan keindonesiaan dalam konteks kenegaraan yang plural serta memberi perhatian terhadap isu-isu sekuler seperti pendidikan politik. Di Probolinggo, isu tentang pendidikan politik menjadi salah satu isu politik yang dominan pasca reformasi. PKB merupakan partai terkuat di daerah ini dengan memenangi dua kali Pemilu. Keberhasilan PKB tidak bisa dilepaskan dari struktur sosial dan keagamaan masyarakat Probolinggo yang notabene merupakan pengikut NU yang taat. Akan tetapi, menarik mencermati bagaimana agenda pendidikan politik, yang relatif baru bagi dunia kepartaian di Indonesia, diimplementasikan oleh partai politik yang mengalami kendala struktural dan kultural.

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan pendidikan politik sebagaimana terdapat di dalam platform PKB, dan berikutnya mengukur sejauhmanakah rumusan ideasional tersebut mampu diimplementasikan pada tataran praktis dan lokal di Probolinggo. Adakah kesenjangan yang muncul antara platform sebagai konsep pokok di dalam menuntun kinerja partai dengan kerja partai pada tingkat praktis. Data-data yang diperoleh kemudian dianalisis dalam tiga konteks, yaitu konteks konfigurasi sosial dan politik di Probolinggo, konteks transformasi di tubuh NU, serta konteks perubahan artikulasi Islam politik pasca reformasi. Meskipun demikian, dua analisis yang terakhir tetap dilakukan dengan tujuan memperluas analisis dan menunjukkan adanya kontinuitas di dalam dinamika politik dan sosial di Probolinggo. Untuk mendapatkan data dan hasil yang akurat, penulis menggunakan pendekatan sosiologi politik yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai interaksi politik dan sosial, dinamika serta konflik yang terjadi di Probolinggo. Penelitian dilakukan dengan memanfaatkan data-data primer dan sekunder. Data primer berupa hasil wawancara dengan responden, dokumen atau arsip organisasi, dan hasil-hasil keputusan penting, sedangkan data sekunder berupa hasil-hasil penelitian, buku, jurnal, dan lain-lain.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pendidikan politik PKB di Probolinggo diaplikasikan dalam enam model pokok, yaitu (1) Kampanye Pemilu dan Pilkada, (2) Pelatihan politik kader dan diskusi publik, (3) Pembentukan organisasi tani dan nelayan, (4) Penghijauan lingkungan, (5) Patronase kyai dan kegiatan keagamaan, dan (6) Pemberdayaan masjid. Enam model pendidikan politik tersebut merupakan implementasi dari platform PKB yang pada tingkat praktis dihadapkan pada sejumlah kendala pokok, baik struktural maupun non-struktural, di antaranya; tidak adanya dokumentasi, analisis dan pengelolaan yang profesional terhadap kegiatan tersebut, minimnya kader profesional di PKB, ketergantungan terhadap aktor, kegagalan dalam membangun aliansi dengan kelompok lain, serta munculnya kecenderungan oligarki. Namun bukan berarti bahwa pendidikan politik yang telah dilaksanakan sepanjang pendirian PKB tahun 1999 sampai dengan 2008, ketika penelitian ini dilakukan, kehilangan relevansinya dengan dinamika sosial dan politik di Probolinggo. Relevansi pokok dari pendidikan politik tersebut adalah memberikan kontekstualisasi terhadap reformasi yang berlangsung di tingkat nasional serta meningkatkan kualitas demokrasi yang sedang berjalan. Pendidikan politik PKB sekaligus menandai pergeseran paradigma politik NU, yang juga berarti pergeseran paradigma Islam politik. Islam politik pasca reformasi relatif tidak mempermasalahkan posisi formal Islam dalam NKRI, suatu fenomena yang belum pernah terjadi dalam sejarah perpolitikan di tanah air pada periode sebelumnya.

Kupersembahkan;

*Untuk 'segitiga emas' dalam hidupku; Ayah, Ibu dan Nenek
Serta*

*Untuk mereka yang masih menyimpan Indonesia
dalam hatinya*

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan tesis ini, bersumber dari pedoman Transliterasi Arab-Latin yang diangkat dari *Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/U/1987, selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍaḍ	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)

غ	ghain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	y	Ya

2. Vokal

a. Vokal tunggal:

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	A
ِ	Kasrah	i	I
ُ	Dammah	u	U

b. Vokal Rangkap:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َـي	Fathah dan ya	ai	a-i
َـو	Fathah dan Wau	au	a-u

Contoh:

كيف ---- *kaifa*

حول ----- *hauila*

c. Vokal Panjang (*maddah*)

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah dan alif	ā	A dengan garis di atas
يَ	Fathah dan ya	ā	A dengan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	ī	I dengan garis di atas
وُ	Dammah dan wau	ū	U dengan garis di atas

Contoh:

قال ---- *qāla* قيل ---- *qīla*
 رمي ---- *ramā* يقول ---- *yaqūlu*

3. Ta *marbuṭah*

- Transliterasi *Ta' Marbuṭah* hidup adalah "t".
- Transliterasi *Ta' Marbuṭah* mati adalah "h".
- Jika *Ta' Marbuṭah* diikuti kata yang menggunakan kata sandang "ال" ("al-"), dan bacaannya terpisah, maka *Ta' Marbuṭah* tersebut ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

روضة الاطفال ---- *rauḍah al-atfāl*
 المدينة المنورة ---- *al-Madīnah al-Munawwarah*
 طلحة ----- *Ṭalḥah*

4. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydid*)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydīd* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata .

Contoh:

نزل ----- *nazzala*
 البر ----- *al-birru*

KATA PENGANTAR

Bismillāhirrahmānirrahīm

Sebuah karya yang telah selesai pada hakikatnya bukanlah hasil kerja soliter yang semata-mata individual, melainkan kerja bersama dengan melibatkan jasa dan bantuan dari banyak pihak. Tesis saya ini, berjudul TRANSFORMASI GERAKAN PARPOL ISLAM ERA REFORMASI (*Studi Terhadap Pendidikan Politik PKB Tahun 1998-2008 di Kabupaten Probolinggo, Jatim*), tidak akan rampung tanpa saran, kritik dan dukungan dari banyak pihak yang dengan caranya masing-masing memberikan sumbangsih yang tidak sedikit. Bagi sederet hutang budi tersebut, tidak ada yang bisa saya lakukan kecuali memberi penghormatan dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya, khususnya kepada;

1. Prof. Dr. H.M. Amin Abdullah, Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Prof. Dr. H. Iskandar Zulkarnain, Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, sekaligus sebagai pembimbing tesis yang inspiratif, terbuka dan telah menghibahkan banyak saran yang berharga.
3. Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A. Ketua Prodi Hukum Islam pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Prof. Kyai Yudian W. Asmin, Ph.D. Beliau telah mengajarkan arti dedikasi dan perjuangan.

5. Seluruh responden penelitian, khususnya Bapak H. Miskari, Mas Ahmad Badawi, Kyai Hawasik Hannan, Mas Gandhi Hartoyo, serta segenap pengurus DPC PKB Probolinggo.

Bagi saya pribadi, tesis ini lebih dari sebatas karya akademik *an sich*, ia merupakan monumen yang menghimpun begitu banyak kenangan dan cerita, mengabadikan suatu fase dalam hidup saya di mana samar-samar saya mulai menyadari kekuatan dan kelemahan sendiri, serta di manakah tempat saya dalam sejarah. Saya merasa beruntung dibesarkan dalam sebuah keluarga yang bersahaja dan penuh kasih. Ayah, ibu dan nenek adalah *segitiga emas* yang telah membaktikan ketulusan, kesabaran dan hidup mereka bagi masa depan anak-anaknya. Untuk adikku satu-satunya, Robi'atul Adawiyah, dan kakakku, Mbak Nining sekeluarga, mereka telah membuat rumah menjadi istana kecil yang selalu saya rindukan di perantauan. Serta untuk Bilda, kehadiranmu begitu bersahaja

Saya merasa bersyukur dianugerahi begitu banyak teman yang secara langsung maupun tidak memberikan pengaruh akademis dan nilai dalam kehidupan yang tidak selalu ramah ini. Sahabat-sahabat angkatan 2006, Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam: Mukhtarom, Samad Umarama, Ridwan, Rahmatullah, Dedeng Alamsyah, Ludyansyah, Mukhlis Mubarak Dalimunthe, Najamuddin, Adzani, Hilyatul Auliya, Eka Martini dan Fitri. Buat sahabat di Forum Mahasiswa Pascasarjana se-Indonesia (FWI), khususnya untuk Bang Ridha, Mbak Musdalifah, Ainur, Syamsul Muniri, ifa dan Septi. Untuk sahabat di Tim Badminton dan Futsal *Gowok United* (GU), serta untuk Ahmala, Tasyriq,

Qoid dan Sabri; teman minum kopi yang setia dan selalu datang dengan cerita yang tak pernah habis.

Penyebutan sederet nama di atas merupakan penghormatan yang bisa saya berikan untuk budi baik mereka. Tentu saja, tanggung jawab atas kesalahan dan kekurangan tesis ini ada pada diri saya pribadi. Tesis ini merupakan upaya saya untuk memahami dialektika antara Islam dan Indonesia yang tentunya memiliki kelemahan di sana-sini. Untuk itu saya persilahkan kepada sidang pembaca yang budiman untuk memberikan masukan dan kritik. Akan tetapi lepas dari persoalan itu, saya semakin yakin bahwa Indonesia dan Islam merupakan dua entitas yang menghidupi dan akan terus hidup di hati kita masing-masing. Akhirnya, puji syukur saya ucapkan kepada Allah yang maha kuasa, kepada-Nyalah saya ingin berserah diri.

Yogyakarta, 06 Juni 2010

Penulis

Zuhri Humaidi, S.H.I

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Kegunaan Penelitian	13
E. Metode Penelitian.....	13
F. Telaah Pustaka.....	16
G. Kerangka Teoritik	20
H. Sistematika Pembahasan	28
BAB II: DISKRIPSI WILAYAH PENELITIAN	30
A. Kondisi Geografis dan Demografis	30
B. Kondisi Agama, Pendidikan dan Budaya	34
C. Kondisi Sosial dan Politik	48

BAB III: FORMULASI, DINAMIKA DAN MODEL PENDIDIKAN

POLITIK PKB DI PROBOLINGGO	57
A. Historiografi PKB	57
1. PKB dalam Konteks Nasional.....	57
2. PKB dalam Konteks Probolinggo	61
B. Pendidikan Politik dalam Platform Partai	70
C. Model Pendidikan Politik di Probolinggo.....	79
1. Kampanye Pemilu dan Pilkada	80
2. Pelatihan Politik Kader	83
3. Pembentukan Organisasi Tani dan Nelayan	87
4. Aksi Penghijauan Lingkungan	91
5. Pantronase Kyai dan Kegiatan Keagamaan	95
6. Pemberdayaan Masjid	98

BAB IV: PENDIDIKAN POLITIK PKB DALAM TIGA KONTEKS

ANALISIS	101
A. Pendidikan Politik dalam Konfigurasi Politik dan Sosial di Probolinggo	102
B. Transformasi Politik dari NU Hingga PKB.....	116
C. Potret Baru Islam Politik	129

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	144
B. Saran.....	149

DAFTAR PUSTAKA

151

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. NAMA-NAMA RESPONDEN
2. SURAT-SURAT
3. DOKUMENTASI PARTAI
4. CURRICULUM VITAE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semenjak runtuhnya rezim Orde Baru pada akhir Mei 1998, iklim politik di Indonesia begitu terbuka bagi berbagai eksperimen politik. Aspirasi yang tertekan dan dimanipulasi sedemikian rupa ketika Orde Baru berkuasa memperoleh ruang artikulasinya kembali. Sebelum reformasi berlangsung hanya terdapat dua partai politik dan satu organisasi kekaryaan (Golkar) yang menjadi mesin politik rezim. Pemerintah dengan efektif memaksa semua elemen politik untuk masuk ke dalam tiga organisasi tersebut sehingga dengan begitu pemerintah bisa leluasa mengontrol, dan bahkan menekan, beberapa elemen yang berpotensi oposan. Akibatnya pergulatan politik berdasarkan perbedaan ideologi, aliran, dan solidaritas kelas yang merupakan penyangga fundamental politik Orde Lama bukan lagi basis pertarungan yang lumrah di masa Orde Baru.¹ Pemerintah Orde baru berusaha menghilangkan konflik ideologis dengan menciptakan suatu tertib politik yang tujuan utamanya mewujudkan model kenegaraan yang disebut Karl

¹ R. Willian Liddle, *The 1977 Election and New Order Legitimacy*, dalam Leo Suryadinata, *Southeast Asia Affairs 1978* (Singapore: ISE AS, 1972), hlm. 3-17. Penataan politik yang dilakukan pemerintah dengan sistematis mengalienasi kekuatan Islam Politik, di samping kekuatan lainnya, sehingga kelompok ini menjadi paria dalam kehidupan politik di Indonesia. Hal tersebut dilakukan melalui sejumlah manuver seperti kebijakan *Floating Mass*, penyederhanaan partai, dan pengasastunggalan Pancasila yang dilihat sejarawan Taufiq Abdullah sebagai 'halaman terakhir' bagi perjalanan Islam Politik. Meskipun kesimpulan ini kemudian tidak terbukti jika mencermati fenomena kepartaian pasca reformasi yang disemarakkan oleh kemunculan kembali partai-partai Islam. Alienasi yang dilakukan pemerintah tidak mampu menghancurkan basis kekuatan Islam Politik. Taufiq Abdullah, *Islam dan Masyarakat; Pantulan Sejarah Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1987), hlm. 11

D. Jackson sebagai *Bureaucratic Politic* (politik birokratis).² Dalam model ini kekuatan lembaga-lembaga politik di luar pemerintah seperti parlemen, partai politik, serta kelompok kepentingan diperlemah dan dibatasi sedemikian rupa. Partisipasi dalam keputusan publik hampir seluruhnya dijalankan oleh lembaga negara dan segenap perangkatnya seperti pegawai negeri, khususnya perwira dan birokrat, termasuk di dalamnya spesialis berpendidikan tinggi yang dikenal dengan tekhokrat.

Negara berhasil mengkooptasi institusi politik dan sosial yang ada sehingga memungkinkannya membangun legitimasi yang kokoh. Dalam kasus Islam Politik, negara membatasi perkembangannya melalui politik alienasi yang sistematis, sambil tetap mendorong Islam yang berorientasi ibadah dan sosial.³ Para pemimpin politik muslim yang berhasrat kembali menempatkan Islam dalam arus utama perpolitikan nasional menemui kegagalan. Islam politik ditempatkan dalam posisi yang sejajar dengan komunisme melalui klasifikasi ekstrem kanan untuk Islam politik serta ekstrem kiri untuk komunisme. Ekstrem kanan merupakan stigmatisasi yang diberikan pemerintah Orba untuk mengidentifikasi gerakan-gerakan Islam politik, atau paling tidak berpotensi ke arah itu, baik dari kalangan radikal maupun moderat. Politik muslim dianggap berpotensi

² Karl D. Jackson dan Lucien W. Pye (ed), *Political Power and Communication in Indonesia* (Berkeley: University of California Press, 1978).

³ Strategi ganda demikian sejatinya merupakan adopsi dari kebijakan pemerintahan kolonial yang diterapkan sejak akhir abad dua puluh. Kebijakan itu diperkenalkan oleh Snouck Hourgronje, seorang penasehat kolonial yang juga pakar masalah-masalah keislaman. Teori Snouck secara efektif berhasil mematahkan kekuatan Islam di Aceh dan Jawa, serta beberapa daerah lainnya di nusantara. Bagi Snouck, pemerintah kolonial harus bersikap akomodatif terhadap Islam sebagai agama berdasarkan asas-asal liberal pemerintah Belanda, akan tetapi membatasi setiap tendensi ke arah munculnya Islam sebagai kekuatan politik. Harry J. Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit; Islam Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1980), hlm. 40-52.

melahirkan kekacauan nasional karena pengingkarnya terhadap identitas paling dasar dari nasionalisme Indonesia, yaitu keragaman agama, etnisitas serta kebudayaan penduduknya.⁴

Lanskap politik pasca Orde Baru membawa beberapa perubahan penting di antaranya penataan kembali sistem kenegaraan dan perpolitikan nasional. Sektor-sektor politik di luar negara diizinkan berkembang. Masyarakat dari kelompok yang beragam diberi kebebasan untuk mendirikan partai politik, termasuk mendirikan partai Islam.⁵ Sebelum Pemilu 1999 digelar, tercatat sebanyak 181 partai politik didirikan oleh berbagai komponen bangsa. Dari jumlah tersebut, 42 di antaranya merupakan partai-partai Islam. Meskipun setelah melewati tahap penyaringan yang dilakukan oleh Tim Sebelas Departemen Dalam Negeri, hanya 48 partai yang berhak dan terdaftar sebagai peserta Pemilu 1999, di mana 20 di antaranya merupakan partai Islam. Mencermati dinamika perkembangan partai politik di atas maka dapat disimpulkan suatu fakta dasar bahwa terjadi pergeseran penting di Indonesia, yaitu pergeseran dari *state* ke *political society*, dari birokrat ke politisi. Negara tidak lagi menjadi aktor utama dan satu-satunya yang menentukan rumusan politik Indonesia ke depan. Kekuatan non-negara, *Civil Society* dan *Political Society*, memperoleh reputasi dan kepercayaan untuk melakukan perubahan-perubahan mendasar demi terwujudnya masyarakat yang

⁴ Abdul Munir Mulkhan, *Runtuhnya Mitos Politik Santri* (Yogyakarta: SIPRESS, 1994), hlm. 31.

⁵ Daniel Dhakidae, *Partai-Partai Politik Indonesia; Kisah Pergerakan dan Organisasi dalam Patahan-Patahan Sejarah*, dalam Litbang Kompas, *Partai-Partai Politik Indonesia; Ideologi, Strategi dan Program* (Jakarta: Kompas, 1999), hlm. 39, Kevin Raymond Evans, *Sejarah Pemilu dan Partai Politik di Indonesia* (Jakarta: Arise Consultancies, 2003), hlm. 28.

terbuka dan demokratis.⁶ Perubahan yang juga dramatis adalah munculnya Islam Politik sebagai kekuatan pokok yang menyedot perhatian setelah sekian lama berada di pinggiran kekuasaan negara. Islam politik yang mengalami marginalisasi kini menemukan ruang legalnya untuk menjadi pelaku politik utama.

Dari konteks tersebut, kemunculan PKB dalam panggung politik nasional paling tidak menandai dua pergeseran, yakni menguatnya aktor non-negara dan bangkitnya aura Islam politik. PKB lahir dari rahim organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, yaitu NU. Pada beberapa dasawarsa terakhir rezim Soeharto NU menarik diri dari kancah politik praktis dengan menfokuskan gerakannya pada wilayah sosial kemasyarakatan.⁷ Akan tetapi situasi politik pasca Soeharto mendorong masyarakat *nahdliyyin* untuk memberikan partisipasi politik maksimal sehingga dari basis NU lahir setidaknya empat partai politik, yaitu PKB, PNU, PKU dan partai SUNI. Di antara keempat partai itu PKB memiliki posisi yang lebih strategis karena secara resmi dibidani kelahirannya oleh PBNU sehingga menjadi wakil paling representatif kehadiran kembali NU dalam panggung politik.

Ikatan kesejarahan tersebut memberikan PKB basis konstituen yang jelas di wilayah-wilayah yang selama ini menjadi kantong NU. Terlebih lagi, PKB didirikan oleh Abdurrahman Wahid (Gus Dur), seorang tokoh yang dikenal memiliki pergaulan dan pengaruh yang luas. Kepemimpinan Gus Dur membuka kemungkinan bagi PKB untuk menarik dukungan dari berbagai kelompok di luar

⁶ Cornelis Lay, *Involusi Politik; Esei-Esei Transisi Indonesia* (Yogyakarta: PLOD, 2006), hlm. 207.

⁷ Mengenai kiprah NU di era Orde Baru lihat Martin Van Bruinessen, *NU; Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, dan Pencarian Wacana Baru* (Yogyakarta: LKiS, 1999), Andre Feillard, *NU Vis-à-Vis Negara* (Yogyakarta: LKiS, 1999).

NU, terutama kelompok-kelompok minoritas yang selama ini menjadi objek pembelaan Gus Dur. Oleh sebab itu PKB memilih untuk tidak mencantumkan asas dan ideologi Islam dengan menyatakan diri sebagai partai terbuka, walaupun dengan memperhatikan elemen kepartaiannya secara menyeluruh PKB tetap bisa diidentifikasi sebagai partai Islam. Hal ini tampaknya menunjukkan perkembangan artikulasi politik muslim yang berbeda dari generasi sebelumnya. Pada generasi terdahulu, simbolisasi Islam, pendirian negara Islam, ataupun menjadikan Islam sebagai dasar negara merupakan orientasi pokok, sedangkan pada generasi sekarang, khususnya di PKB, orientasi tersebut sudah ditinggalkan. Di kalangan partai Islam lain yang lebih radikal seperti PKS, PPP, dan PBB, simbolisasi Islam masih massif dilakukan, namun tujuan pendirian negara Islam juga sudah diabaikan. Mereka lebih memilih langkah politik pragmatis dan realistis dengan memasuki sistem politik yang tersedia untuk meraih akses besar dalam proses pembuatan keputusan tanpa meninggalkan prinsip-prinsip Islam. Isu-isu lain seperti perbaikan ekonomi, pendidikan, pemberantasan KKN, dan demokratisasi tampaknya lebih menarik minat.

Di PKB, tiga isu di atas tidak terlihat. Aspirasi warga *nahdliyyin* lebih tertuju pada perbaikan dalam bidang sosial, ekonomi, politik, agama, dan pendidikan karena semenjak dasawarsa terakhir sejumlah isu tersebut menjadi fokus utama gerakan NU. Ketika reformasi bergulir, harapan itu tidak hanya dibebankan pada NU tetapi pada saluran lain yang dianggap lebih efektif seperti PKB. PKB tidak diragukan lagi dianggap sebagai pewaris sah perjuangan politik NU sehingga ia selain mewarisi basis konstituen yang solid dan merata, juga

mewarisi kelemahan mendasar NU dalam pengadaan sumber daya politik. Walaupun ketika didirikan, PKB sejatinya dikawal oleh sejumlah kader muda yang memiliki kualifikasi dalam dunia politik dan keilmuan, namun skalanya sangat kecil jika dibandingkan dengan prosentase basis PKB. Konstituen PKB kebanyakan merupakan masyarakat kelas menengah ke bawah yang tidak mempunyai kesadaran dan kemampuan memadai untuk aktif sebagai masyarakat politik. Untuk kepentingan praktis jangka pendek hal itu tidak menjadi persoalan penting, akan tetapi dalam perhitungan politik yang lebih luas problem itu tentu saja mengkhawatirkan. Partai politik di dalam pemerintahan yang demokratis dituntut untuk tidak hanya meraup suara maksimal pada setiap pemilihan, tetapi juga memiliki kader dan konstituen yang sadar akan hak dan kewajiban politiknya. Kader dan konstituen yang demikian akan memberikan kekuatan yang efektif dan solid bagi sebuah partai untuk menjadi pilar utama keberadaan negara yang demokratis.

Dalam konteks ini, PKB sejatinya mempunyai alasan kuat untuk memprioritaskan agenda pendidikan dan pemberdayaan politik. Konstituen utamanya di desa-desa merupakan korban paling parah dari proyek depolitisasi Orde Baru. Melalui kebijakan *floating mass*, mereka dipisahkan dari dinamika dan perubahan politik yang terjadi di tingkat nasional maupun daerah. Itulah sebabnya mengapa budaya politik, pendidikan, serta kaderisasinya tidak berkembang dengan baik. Sejumlah elit dan kader PKB menyadari hal ini sejak awal sehingga visi, platform, dan AD/ART-nya salah satunya diarahkan untuk pendidikan dan

peningkatan partisipasi politik masyarakat.⁸ Dari tahun 1999-2001, disebabkan terpilihnya Abdurrahman Wahid sebagai presiden RI, PKB memposisikan diri sebagai pilar politik utama kepresidenan Abdurrahman Wahid. Tidak tampak adanya upaya-upaya yang signifikan untuk mengimplemetasikan visi di atas dalam program partai.

Baru sejak tahun 2002, orientasi partai mulai secara serius diarahkan untuk memperbaiki sumber daya politik yang terabaikan, di antaranya dengan membentuk institusi-institusi baru yang relevan, mendorong dewan wilayah dan cabang untuk memperhatikan kualitas konstituen, atau dengan memunculkan isu sebagai Partai Advokasi.⁹ Langkah tersebut memang seharusnya dilakukan karena di antara fungsi partai adalah sosialisasi dan peningkatan kesadaran publik. Fungsi ini menjadi kian nyata dan dibutuhkan ketika iklim politik lebih terbuka.¹⁰ Keterbukaan yang menghidupi iklim politik Indonesia menyebabkan ledakan partisipasi yang mengarah pada kekerasan politik, khususnya di tingkat akar rumput. Fenomena itu muncul karena dipisahkannya masyarakat dari kehidupan politik membawa konsekuensi tidak adanya pemahaman yang memadai mengenai pluralisme politik serta sedikitnya lembaga sosial yang bisa mengelola hal

⁸ Cita-cita mengenai kemadirian dan penguatan kesadaran politik masyarakat secara jelas tercermin dalam keputusan-keputusan penting DPP PKB, di antaranya dalam naskah deklarasi, *Mabda' Siyasiy*, AD/ART, serta keputusan Mukhtar dan Mukernas.

⁹ Keputusan untuk menjadi Partai Advokasi dihasilkan dari Mukernas tanggal 13-14 Agustus 2001 dan Mukhtar Luar Biasa tanggal 17-19 Januari 2002 di Yogyakarta. Eman Hermawan, dkk, *Partai Advokasi; Wacana Keberpihakan dan Gerakan* (Yogyakarta: DPP PKB dan KLIK.R, 2004), Muhammad Lukman Edy, *Reformulasi Gerakan PKB* (Yogyakarta: DPP PKB, Iskandarsyah Institute, KLIK.R, 2006), hlm. 80.

¹⁰ Fungsi sosialisasi di negara-negara berkembang, terutama yang memasuki tahap transisi demokrasi, memainkan peranan yang lebih penting dari peranannya di negara-negara yang sudah maju. Mengenai hal ini lihat Myron Weiner dan Josep La Palombara, *Pengaruh Partai terhadap Perkembangan Politik*, dalam Miriam Budiarto (ed), *Partisipasi dan Partai Politik* (Jakarta: Gramedia, 1981), hlm. 187.

tersebut. Di sisi lain, pada pemilu 2004 angka Golput semakin meningkat yang ditengarai disebabkan menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap partai. Apatisme terhadap partai disebabkan munculnya kekecewaan masyarakat terhadap kinerja partai semenjak reformasi.

Fakta di atas membawa efek yang signifikan bagi PKB yang notabene memiliki basis sosial di kalangan masyarakat bawah. Namun persoalannya bisakah PKB menggarap masalah itu dengan baik, sementara ia dihadapkan pada problem-problem lain yang juga dominan. Berbeda dengan partai-partai lama semisal PDI-P, Partai Golkar, dan PPP, PKB adalah partai baru di mana perangkat dan lembaga kepartaiannya belum solid dan mengakar kuat sebagaimana partai-partai lama. Kesulitannya terletak pada bagaimana membentuk suprastruktur yang efektif ditingkat kabupaten, kecamatan, dan desa.

Sejauh ini, PKB belum mampu menciptakan mekanisme yang memetakan kewenangan dewan pusat dan daerah. Kekuasaan berada penuh di tangan DPP, khususnya pada figur Gus Dur, sehingga banyak keputusan yang merepresentasikan kepentingan daerah dan dihasilkan secara demokratis digagalkan sepihak. Patronase Gus Dur di satu sisi membawa keuntungan karena kharismanya sebagai pejuang demokrasi dan HAM melintasi batas-batas etnisitas dan agama, tetapi di sisi lain hal itu menghambat pelembagaan konflik dan kontestasi di dalam partai. Perkembangan PKB secara keseluruhan menunjukkan gejala terpisahnya kebijakan partai dengan aspirasi konstituen, antara pemegang mandat dan pemberi mandat. Kecenderungan yang oleh Robert Michels disebut Oligarki. Oligarki adalah disparitas antara keinginan massa rakyat yang telah

mewakilkkan kewenangannya dengan kebijakan yang diambil oleh para pemegang mandat. Oligarki dimulai dari kecenderungan Neo-Konservatisme, yaitu bukan saja dalam pengertian mengabaikan nilai-nilai yang dibela ketika reformasi, akan tetapi juga suatu gerak balik untuk membela partai demi kepentingan partai *an-sich*.¹¹ Maka bisa dipahami jika kemudian tumbuh gejala birokratisme kepartaian di kalangan elit-elit PKB. Meskipun perlu ditegaskan di sini, jika diperiksa dengan seksama, perkembangan rata-rata partai di Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir tidak jauh-jauh dari apa yang dikategorikan Michels di atas. PKB hanyalah suatu gambaran dari gejala yang lebih akut. Oleh karenanya pertanyaan penting yang mesti diajukan, bisakah PKB mengimplementasikan visi dan orientasi pendidikan politiknya di tengah hambatan struktural dan kultural di atas.

Dalam kasus Kabupaten Probolinggo, PKB merupakan partai terkuat. Daerah ini menjadi *enclave* PKB yang memenangi dua kali Pemilu. Keberhasilan PKB tidak bisa dilepaskan dari struktur sosial dan keagamaan masyarakat Probolinggo yang notabene merupakan pengikut NU yang taat. Tidak mengejutkan jika cabang ini menjadi salah satu cabang yang memperoleh kemenangan signifikan di Jawa Timur pada dua Pemilu terakhir. Basis massanya merupakan konstituen yang konsisten memilih PKB, yang secara sosial terdiri dari masyarakat pedagang, petani, dan nelayan. Di era Orde Baru mereka merupakan kelompok yang paling dirugikan secara ekonomi, politik, dan pendidikan. Di era reformasi, perbaikan dalam bidang-bidang tersebut memang telah dilakukan namun belum menghasilkan perubahan yang signifikan. Dalam

¹¹ Daniel Dhakidae, *Partai-Partai Politik, Demokrasi, dan Oligarki*, dalam Litbang Kompas, *Partai-Partai Politik Indonesia; Ideologi dan Program 2004-2009* (Jakarta: Kompas, 2004), hlm. 15

batas-batas tertentu, pergeseran yang lebih nampak terjadi dalam pemahaman masyarakat tentang arti dan fungsi berpolitik. Hal tersebut bisa diidentifikasi dari tidak adanya konflik politik yang kemudian meletup menjadi kekerasan dan kerusuhan besar seperti terjadi di daerah lain di Indonesia. Perbedaan afiliasi politik para ulama yang tersebar ke berbagai saluran politik, seperti PKB, PPP, dan Partai Golkar, tidak sampai diikuti oleh segregasi sosial pengikutnya. Memang terjadi kericuhan kecil, namun biasanya muncul pada momentum besar seperti Pemilu dan masih dalam skala kecil sehingga tidak bisa dikategorikan sebagai fanatisme politik.

Menguatnya tingkat kesadaran publik itu disebabkan oleh pelbagai faktor yang saling mendukung. Di PKB sendiri, beberapa program dan strategi partai memang diarahkan ke tujuan tersebut. Semenjak sepuluh tahun terakhir, dari 1998-2008, diseleggarakan berbagai program pelatihan, penyuluhan, rapat-rapat besar, serta didirikan lembaga-lembaga baru yang diorientasikan untuk pendidikan politik. Dengan kata lain pelembagaan partisipasi dan konflik di PKB telah mulai dilakukan. Fakta di atas tidak mesti terkait, dalam relasi kausalitas, dengan menaikinya tingkat partisipasi dan kecerdasan publik. Bisa jadi langkah strategis yang dilakukan PKB tidak terkait langsung dengan proses pemberdayaan. Hal itu lebih diprioritaskan sebagai sarana mobilisasi dan politik pencitraan (*political image*). Peran organisasi sosial-keagamaan, LSM, keterbukaan media, dan kaum intelektual tidak bisa diabaikan sebagai faktor lain yang signifikan. Akan tetapi mengingat tingginya perhatian dan respon terhadap partai maka penting untuk menjadikan partai sebagai unit analisis dalam menilai perubahan yang terjadi. Di

era demokrasi politik, partai lah yang mempunyai kemampun efektif untuk mempengaruhi perkembangan yang terjadi dalam ranah publik. Partai mempunyai infrastruktur, jaringan, kemampuan finansial, wakil-wakil di Parlemen, dan ideologi melebihi organisasi lain.¹²

Sebagai basis tradisionalisme Islam yang kuat, peranan partai seperti PKB tidak bisa tidak menjadi salah satu faktor kunci untuk memahami dinamika yang terjadi di Probolinggo. Pelbagai masalah lain tentunya harus didiskripsikan dengan jelas untuk mendapatkan gambaran utuh. Problem kepartaian di Indonesia hampir seluruhnya terjadi di sini. Konflik internal partai, budaya *patron-client*, gejala oligarki, *money politic*, dan lain sebagainya merupakan batu sandungan yang tidak saja menyebabkan turunnya kepercayaan publik terhadap partai, lebih dari itu menghambat proses demokratisasi politik yang sedang berjalan. Oleh karena itu penting untuk memetakan fungsi dan peranan PKB selama sepuluh tahun perkembangannya dalam konfigurasi politik dan sosial di Probolinggo, khususnya peranannya dalam pendidikan politik publik. Pembahasan secara tepat dan kontekstual mengenai fakta tersebut akan menggambarkan salah satu perkembangan, atau lebih tepatnya percobaan, artikulasi Islam Politik dalam konteks masyarakat Indonesia yang multietnik dan agama.

¹² Hairus Salim HS, dkk, *Tujuh Mesin Pendulang Suara* (Yogyakarta: LKiS, 1999), hlm. 5

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan di atas, maka penelitian ini selanjutnya berusaha menjawab beberapa persoalan pokok sebagaimana berikut;

1. Bagaimana strategi dan model pendidikan politik yang dilakukan DPC PKB Kabupaten Probolinggo dalam kurun 1998 – 2008 ?
2. Apa saja kendala struktural dan kultural yang dihadapi menyangkut implementasi program tersebut ?
3. Apa signifikansi pendidikan politik tersebut dalam konfigurasi politik dan sosial di Probolinggo, transformasi politik NU, serta seberapa besar peranannya dalam merumuskan format baru Islam Politik di Indonesia pasca reformasi?

C. Tujuan Penelitian

Ada beberapa tujuan pokok yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini, di antaranya sebagai berikut;

1. Mengetahui dan memperoleh pemahaman mengenai dinamika sosial-politik, baik internal maupun eksternal, yang mendorong DPC PKB Probolinggo melakukan pendidikan politik bagi masyarakat.
2. Memperoleh gambaran serta analisis mengenai model dan strategi pendidikan politik yang dilakukan DPC PKB Kabupaten Probolinggo.
3. Menguji relevansi pendidikan politik dalam konteks politik dan sosial masyarakat Probolinggo, serta dalam konteks transformasi politik NU.

4. Memperoleh gambaran serta kemungkinan yang bisa dilakukan oleh partai politik Islam, di Probolinggo maupun di Indonesia, dalam mengkompromikan kepentingan partai, ideologi, dan kepentingan bangsa secara keseluruhan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut;

1. Memberikan kontribusi akademik bagi perluasan wacana ilmu politik, khususnya bagi kajian politik Islam di Indonesia.
2. Memberikan masukan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan elemen-elemen politik lainnya dalam membangun sistem politik dan kepartaian yang lebih demokratis.
3. Memberikan arah dan kemungkinan baru bagi dunia kepartaian, khususnya bagi partai-partai Islam, di Indonesia pasca-reformasi.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif yang berlangsung sejak Mei sampai dengan Agustus 2008. Metode tersebut digunakan untuk mendapatkan pengertian yang lebih mendalam dari model, dinamika, konflik, serta proses-proses politik yang dilakukan DPC PKB Kabupaten Probolinggo. Oleh karenanya untuk mendapatkan jawaban yang memuaskan atas beberapa masalah utama yang menjadi fokus penelitian, maka penulis menggunakan kerangka metodologi yang mencakup; teknik pengumpulan data, metode analisis, dan pendekatan penelitian.

1. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan melacak dokumen, arsip, selebaran maupun informasi yang dimiliki PKB maupun diekspose oleh media yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan DPC PKB Probolinggo. Data-data yang digunakan tersebut merupakan bahan-bahan yang dimiliki oleh DPC PKB serta KPU setempat, ataupun dari sumber-sumber lain yang memungkinkan. Pencarian data juga dilakukan dengan mewawancarai beberapa informan yang sebagian adalah tokoh-tokoh politik. Untuk mendapatkan target yang memuaskan, maka teknik yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur (*unstructured interview*) sehingga memungkinkan pewawancara memperoleh informasi yang akurat. Hasil-hasil wawancara itu merupakan data primer yang sangat penting karena tidak semua informasi bisa didapatkan di dalam dokumen maupun arsip. Selain itu penulis juga akan mempergunakan data sekunder yang berupa hasil-hasil penelitian terdahulu, buku, artikel, serta bahan-bahan lain yang mendukung. Sumber tersebut akan dijadikan sebagai referensi yang memperkuat temuan yang diperoleh.

2. Metode Analisis

Pada tahapan ini, peneliti akan menyeleksi dan menverifikasi data-data yang diperoleh melalui analisis diskriptif-kualitatif. Analisis kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh pemahaman yang akurat dan mendalam karena unit analisisnya merupakan fakta/kejadian

yang sulit diukur secara kuantitatif.¹³ Dalam teknik analisis kualitatif ini penulis menggunakan tiga tahapan; pertama, reduksi data, yaitu proses pemilihan data untuk menyederhanakan, mengabstraksikan, dan mentransformasi data-data yang timbul dari catatan-catatan atau berbagai laporan di lapangan. Kedua, penyajian data, adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan sekaligus pengambilan tindakan. Penyajian pada umumnya digunakan dalam penggambaran data di masa lalu dengan bentuk teks naratif. Perkembangan selanjutnya dalam penyajian data kualitatif ini juga meliputi penyajian dengan berbagai jenis matriks, bagan, dan tabel. Ketiga, penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu bahwa dari permulaan pengumpulan data seorang peneliti secara kualitatif mencari makna atas fakta/kejadian, mencatat dengan teratur, mengadakan pemetaan (polarisasi), kemungkinan konfigurasi-konfigurasi, proposisi, dan pencarian alur sebab-akibat (kausalitas). Dalam menangani kesimpulan tersebut, peneliti bertindak longgar, bersifat terbuka, dan kemudian mengembangkan secara jelas analisis data-data yang telah diperoleh dengan pembahasan sistematis. Penarikan kesimpulan tersebut juga diverifikasi selama penelitian berlangsung agar nilai-nilai validitas dan obyektivitas betul-betul terjaga dengan baik.

¹³ Lisa Harrison, *Metodologi Penelitian Politik*, terj. Tri Wibowo (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 86

3. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan latar belakang serta pokok masalah yang akan diteliti, maka studi ini menggunakan pendekatan sosiologi politik karena objek persoalan yang akan dikaji menyangkut relasi dan interaksi antara sistem dan institusi politik di satu sisi, serta interaksi sosial, budaya dan partisipasi politik di sisi lainnya. Oleh karenanya sosiologi politik dimaksudkan sebagai disiplin yang mempelajari mata rantai antara politik dan masyarakat, antara suprastruktur dan infrastruktur politik, serta antara struktur sosial dan struktur politik.¹⁴ Studi ini menfokuskan diri pada peranan institusi politik¹⁵, yakni PKB, dalam mempengaruhi sikap dan perilaku politik masyarakat Probolinggo. Adakah hubungan relasional yang kuat antara meningkatnya kesadaran politik dan kewargaan masyarakat Probolinggo dengan program-program PKB selama ini. Sebagai salah satu partai politik Islam terkuat di Probolinggo, PKB akan diletakkan sebagai variabel untuk menganalisis perkembangan sosiologis dan politik masyarakat. Sebab itu sosiologi politik dalam studi ini dilihat sebagai jembatan metodologis antara sosiologi dengan ilmu politik.

F. Telaah Pustaka

Kajian mengenai PKB telah banyak dilakukan oleh para peneliti, praktisi politik, ilmuan, maupun mahasiswa. Beberapa di antaranya memberikan

¹⁴ Maurice Duverger, *Sosiologi Politik*, terj. Daniel Dhakidae (Jakarta: Rajawali Press, 2002), hlm. 27, Michael Rush dan Phillip Althoff, *Pengantar Sosiologi Politik* (Jakarta: Rajawali Press, 1997), hlm. 15

¹⁵ Penelitian yang secara khusus mengkaji institusi politik merupakan salah satu pendekatan lain yang sudah jamak dalam ilmu politik. R.A.W Rhodes, *Theory and Methods in Political Science*, edited by David Mars and Gerry Stoker (tth), hlm. 42

sumbangan yang otoritatif, baik secara akademik ataupun jika dimanfaatkan untuk memahami arah perpolitikan Indonesia kontemporer. Salah satunya buku yang ditulis oleh Zainal Abidin Amir (2003) berupaya melihat PKB sebagai kemunculan kembali Islam Politik dalam politik ke-Indonesiaan pasca Orde Baru.¹⁶ Zainal mencatat bahwa reformasi mendorong antusiasme politik umat Islam yang dimanifestasikan dalam pendirian partai-partai politik berbasis Islam. Lima partai Islam yang menjadi objek studi ini adalah PKB, PAN, PPP, PBB, dan PKS yang berusaha dilacak proses kelahirannya, agenda, platform politik, peristiwa-peristiwa yang menyertainya sampai dengan Sidang Umum 1999, serta pemetaan partai politik Islam yang memenangi Pemilu 1999. Meskipun PKB sejak awal mengklaim sebagai partai terbuka, namun beberapa ciri partai Islam dapat ditemukan seperti basis massa, pola keorganisasian dan kepemimpinan, dan simbol-simbol partai. Diskripsi mengenai hal itu diorientasikan untuk menggambarkan keragaman pola dan paradigma Islam politik pasca reformasi.

Buku berjudul “PKB; Jendela Politik Gus Dur” yang ditulis Asmawi (1999) berisi tahapan pendirian PKB yang dilakukan oleh Gus Dur dan sejumlah ulama penting di NU, berikut naskah deklarasi, platform, serta visi ideologis yang menjadi landasannya. Buku ini juga memuat laporan media, artikel, polemik, dan komentar pengamat yang merespon berdirinya partai politik dari rahim NU. Data-data yang terdapat di dalamnya sangat penting dicermati untuk pengembangan penelitian selanjutnya.¹⁷

¹⁶ Zainal Abidin Amir, *Peta Islam Politik Pasca Soeharto* (Jakarta: LP3ES, 2003).

¹⁷ Asmawi, *PKB: Jendela Politik Gus Dur* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1999).

Studi yang dilakukan oleh Asep Saeful Muhtadi (2004) merupakan kajian yang secara spesifik mengkaji komunikasi politik NU sejak tahun 1970-an - 2001.¹⁸ Menurutnya komunikasi politik yang dijalankan NU selalu mengalami pergeseran dan perubahan bentuk sejalan dengan pasang surut kekuasaan rezim, serta antara kekuasaan radikal dan akomodatif di tubuh NU sendiri. Pasca reformasi, komunikasi politik NU semakin berjalan dengan intens yang berujung pada lahirnya PKB sebagai partai yang resmi dibentuk oleh PBNU serta beberapa partai lain yang mengklaim memiliki ikatan tertentu dengan NU. PKB sebagai partai yang baru muncul kemudian mampu menyedot perhatian jutaan pemilih. Studi ini melihat bahwa fenomena itu menunjukkan bahwa di Indonesia proses demokratisasi dan pembaharuan politik lebih dimungkinkan lahir dari gerakan sosial keagamaan daripada lembaga politik formal.

Sedangkan Khoirul Anam (2006) dalam penelitiannya mengangkat isu tentang respon PKB terhadap penegakan Syaria't Islam dan kemudian membandingkannya dengan PKS.¹⁹ Menurutnya terdapat perbedaan yang fundamental antara garis kepartaian yang dipilih PKB dan PKS. PKB sejak awal memilih tidak mendukung penerapan syari'at Islam dalam wujud apapun dan mencoba mengintegrasikan nilai-nilai syari'at dengan kehidupan kebangsaan, sedangkan PKS mendukung penerapan syari'at Islam di Indonesia sesuai dengan konteks sosial dan kebutuhan masyarakatnya.

¹⁸ Asep Saiful Muhtadi, *Komunikasi Politik Nahdlatul Ulama* (Jakarta: LP3ES, 2004).

¹⁹ Khoirul Anam, *Kontroversi Penegakan Syari'at Islam di Indonesia Menurut Partai-Partai Islam; Studi Komparatif Tentang Perbedaan Konsep Penegakan Syari'at Islam di Indonesia Menurut PKB dan PKS* (Yogyakarta: Tesis Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2006).

Buku berjudul “Menuju Partai Advokasi” karya Koirudin (2005) merupakan elaborasi tentang pergeseran paradigma gerakan PKB dari partai pemerintah menuju partai advokasi.²⁰ Menurutnya perubahan tersebut disebabkan beberapa peristiwa penting seperti jatuhnya Gus Dur dari kursi kepresidenan sehingga memaksa PKB untuk keluar dari koalisi partai pemerintah. Penulis juga menguraikan PKB menurut sejarah kelahirannya, perjalanannya mengantarkan Gus Dur sebagai Presiden, pergolakannya di parlemen, sampai pada bentuk-bentuk kepartaiannya di masa-masa yang akan datang.

Buku yang sejenis berjudul “Reformulasi Gerakan PKB” ditulis oleh Lukman Edy (2006).²¹ Sebagai fungsionaris PKB, Edy berusaha melakukan pembacaan terhadap struktur, basis sosial, kekuatan, kelemahan, serta reformulasi PKB dimasa depan. Sebagai partai yang lahir dari tradisionalisme Islam, PKB sedapat mungkin harus melakukan universalisasi terhadap nilai-nilainya sejalan dengan tuntutan nasionalisme dan modernisasi. Modernisasi yang harus dilakukan mencakup pola kaderisasi, demokratisasi, serta penguatan ekonomi dan soliditas di tubuh partai.

Berbeda dari penelitian di atas, studi ini menfokuskan diri pada pola dan peranan pendidikan politik yang dilakukan DPC PKB Kabupaten Probolinggo dalam meningkatkan partisipasi dan kesadaran politik masyarakat di daerah tersebut. Sejak bergulirnya reformasi, terdapat perkembangan yang signifikan menyangkut pelibatan diri masyarakat atas proses-proses politik yang terjadi.

²⁰ Koiruddin, *Menuju Partai Advokasi* (Yogyakarta: LKiS, 2005).

²¹ Muhammad Lukman Edy, *Reformulasi Gerakan PKB* (Yogyakarta: DPP PKB, Iskandarsyah Institute, KLIK.R, 2006).

Studi ini akan berusaha mencari relasi sosiologis dan politis antara perubahan yang muncul dengan program-program politik PKB sejak 1998-2008. Hasil penelitian dan observasi di wilayah itu juga akan digunakan sebagai perangkat dasar untuk melihat transformasi politik NU dan kehidupan Islam Politik di Indonesia pasca reformasi, konflik, dinamika, beserta problem-problem yang dihadapi. Eksistensi partai-partai berbasis Islam, baik yang secara jelas berideologi Islam ataupun yang berideologi terbuka, semakin menemukan momentumnya untuk tampil dalam konfigurasi politik di tanah air.

G. Kerangka Teoritik

Teori tentang partai politik hampir pasti menjadi kajian utama dalam ilmu politik disebabkan vitalnya peranannya dalam konsep kenegaraan modern. Di negara-negara modern saat ini, baik yang totaliter maupun yang demokratis, partai politik menjadi pilar utama kelangsungan jalannya pemerintahan. Meskipun bentuk dan fungsinya berbeda sesuai dengan sistem politik yang diterapkan di negara tersebut. Di negara dengan sistem demokrasi partai politik bertujuan memaksimalkan partisipasi rakyat untuk ikut menentukan pemimpin serta kebijakan-kebijakan umum yang menentukan kehidupan mereka. Adapun di negara-negara totaliter partai politik berfungsi sebagai media mobilisasi dan pembinaan ideologi yang sejalan dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh elit-elit partai.

Beberapa definisi mengenai partai politik telah banyak dikemukakan. Di antaranya dilakukan oleh Joseph Lapalombara dan Mawron Weiner, Carl J. Freidrich, R.H. Soltau, Mac Iver, dan Ramlan Surbakti. Menurut Lapalombara

dan Weiner, partai politik adalah “*organisasi politik yang berakar dalam masyarakat lokal, melakukan kegiatan secara kontinyu, berusaha memperoleh dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan, dan ikut serta dalam pemilihan umum*”. Sedangkan Freidrich maupun Soultau memberi batasan yang hampir sama yakni sebagai sekelompok manusia yang terorganisasikan secara stabil dengan tujuan untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan bagi pemimpin partai, di mana dengan kekuasaan itu akan memberikan keuntungan materil dan idil bagi para anggotanya. Pendapat lain yang sedikit berbeda diberikan oleh Mac Iver. Menurutnya partai politik adalah “*suatu perkumpulan terorganisasi untuk menyokong suatu prinsip atau kebijaksanaan, yang oleh perkumpulan itu diusahakan dengan cara yang sesuai dengan konstitusi atau UUD menjadi penentu cara melakukan pemerintahan*”.²²

Beberapa pengertian yang diberikan ahli politik Barat di atas menurut Ramlan Surbakti sama sekali tidak menyinggung asas ideologi yang merupakan piranti dasar dibangunnya sebuah partai. Hal ini disebabkan pandangan umum di Barat semenjak berakhirnya perang dingin bahwa ideologi sudah berakhir (*the end of ideology*). Terlepas dari pandangan tersebut, bagi Surbakti aspek ideologi tidak bisa diabaikan karena setiap negara memiliki peta pertarungan ideologis yang berbeda-beda. Setiap partai yang diorganisasikan secara baik tentunya dimotivasi dan digerakkan oleh ideologi tertentu, yang akan memudahkan pemaduan berbagai kepentingan yang hidup dalam diri anggotanya.²³

²² Koirudin, *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 63

²³ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Grasindo, 1999), hlm. 116

Sedangkan mengenai partai politik Islam, batasan dan kriterianya beragam sesuai dengan perspektif yang dianut. Pengertian tentangnya kadangkala sulit dilakukan karena semenjak reformasi bergulir, partai-partai Islam di Indonesia tampil dalam bentuk yang tidak monolitik. Sebagian dari partai-partai itu masih menggunakan simbol-simbol Islam seperti nama, asas, tanda gambar, struktur organisasi dan lain-lain. Beberapa yang lain cenderung meninggalkan simbol-simbol Islam, akan tetapi basis massa, pola keorganisasian, serta kepemimpinannya memiliki kaitan yang sangat erat dengan Islam.

Untuk itu, dalam penelitian ini devinisi tentang partai politik Islam dimaknai secara luas menyangkut beberapa kriteria sebagai berikut:

Pertama, menggunakan Islam sebagai asas organisasi. Kedua, menggunakan simbol-simbol yang identik dengan Islam, seperti nama, struktur organisasi, tanda gambar, dan lain sebagainya. Ketiga, basis sosial utama yang menyangga keberadaan partai itu adalah masyarakat muslim, ataupun kelompok muslim tertentu seperti NU ataupun Muhammadiyah. Keempat, sruktur organisasinya dipengaruhi oleh ajaran dan elemen keislaman, seperti penggunaan istilah-istilah yang sangat erat kaitannya dengan semisal Majelis Syura, Majelis Tanfidz, Mukhtar, Mabda' Siyasi, Majlis Syari'ah, Dewan Syari'ah, dan lain sebagainya. Kelima, Partai itu dipimpin oleh tokoh-tokoh yang sekian lama bergelut dalam organisasi Islam. Sedang yang keenam, kebijakan-kebijakan politik yang diambil seringkali diorientasikan bagi kepentingan masyarakat muslim secara khusus, di samping juga untuk masyarakat yang lebih luas. Dengan demikian PKB maupun PAN, meskipun keduanya tidak secara jelas menggunakan simbol dan asas Islam,

bisa diklasifikasikan sebagai partai Islam. PKB dan PAN sejak awal memang mendeklarasikan diri sebagai partai terbuka yang bertekad mengedepankan pluralitas, namun jika dikaji lebih mendalam melalui kriteria di atas keduanya memiliki identitas keislaman yang jelas.²⁴

Perbedaan pandangan di antara pakar politik juga terjadi menyangkut pemahaman mereka mengenai fungsi dan peranan Parpol. Hal demikian disebabkan karena negara yang menjadi objek penelitiannya memiliki tingkat perkembangan serta gejolak politik yang berlainan sehingga Parpol dituntut untuk menjalankan fungsi yang berbeda-beda.²⁵ Adapun fungsi umum (dasar) dari partai politik sebagai berikut;

1. Media Kekuasaan

Partai politik digunakan sebagai sarana mencari dan mempertahankan kekuasaan untuk mewujudkan proyek yang disusun berdasarkan ideologi tertentu.

2. Sosialisasi dan Pendidikan Politik

Partai politik berfungsi sebagai sarana membentuk sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat. Melalui ini diharapkan mereka bisa memahami nilai dan mekanisme politik yang sedang berjalan sehingga mampu menilai segi-segi yang bermanfaat bagi kehidupan mereka.

²⁴ Zainal Abidin Amir, *Peta Islam Politik Pasca Soeharto*, hlm. 20

²⁵ Fungsi Partai politik sangat luas tergantung dari tingkat kebutuhan dan konteks masyarakatnya. Di negara-negara berkembang yang baru merdeka fungsi partai bisa jadi berbeda dengan negara yang sudah maju. Roy C. Macridis, "Sejarah, Fungsi, dan Tipologi Partai-Partai", dalam Ichlasul Amal, *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1996), hlm. 24. Miriam Budiarto, *Partisipasi dan Partai Politik* (Jakarta: Gramedia, 1981), hlm. 14.

3. Rekrutmen Politik

Partai politik berfungsi melakukan seleksi atas anggota-anggota masyarakat yang memiliki kompetensi untuk menduduki jabatan-jabatan publik, baik sebagai pengurus partai maupun di dalam administrasi pemerintahan.

4. Komunikasi Politik

Partai politik digunakan sebagai media pengelola aspirasi dan kepentingan yang beragam dari masyarakat. Penyelesaian atas masalah itu dilakukan dengan cara yang konstitusional, baik dengan jalan kompromi ataupun membawanya ke institusi-institusi resmi yang dimiliki negara.

5. Artikulasi Kepentingan

Partai politik berfungsi sebagai media bagi warga negara untuk mempengaruhi pembuatan dan pelaksanaan kebijakan, serta memilih dan mengawasi pemimpin pemerintahan. Fungsi ini bisa efektif dilaksanakan jika fungsi sosialisasi dan pendidikan politik berjalan dengan baik.

Kelima fungsi yang telah dipaparkan di atas pada prinsipnya menunjukkan bahwa partai merupakan elemen yang sangat vital bagi kelangsungan pemerintahan. Di negara-negara dalam tahap transisi menuju demokrasi, keberadaan Parpol semakin signifikan. Seperti disimpulkan O'Donnel dan Schmitter dari studinya terhadap transisi demokrasi di Amerika Latin dan Eropa Selatan, Parpol berperan dalam merestorasi sistem politik terdahulu serta melakukan transformasi politik dalam konteks yang lebih luas. Pada tahap awal transisi, partai mungkin hanya memiliki saham kecil atau tidak berperan sama sekali. Yang berperan dalam periode tersebut adalah asosiasi-asosiasi profesi,

gerakan-gerakan sosial, gerakan mahasiswa, serikat buruh, kelompok-kelompok keagamaan, para cendekiawan dan seniman.²⁶ Konteks politik tersebut nampaknya juga sejalan dengan perubahan politik dan sosial yang terjadi di Indonesia. Dalam proses reformasi 1998, Parpol tidak mempunyai andil yang memadai. Barulah pada momentum Pemilu 1999 dan berbagai perkembangan politik yang terjadi sesudahnya, parpol memperlihatkan diri sebagai pilar terpenting yang akan mengawal demokratisasi yang sedang berjalan.

Dalam upaya penguatan demokrasi, diperlukan kesadaran dan partisipasi dari seluruh warga negara. Di Indonesia, hal tersebut menjadi problem mendasar karena sekian lama publik tidak terdidik dengan baik secara politik. Karenanya tugas vital dari setiap partai yang muncul pasca reformasi adalah memperbaiki kualitas *Political Society* sehingga mampu berperan dalam mekanisme politik dan pemerintahan. Tugas itu seperti dipaparkan di atas telah menjadi fungsi klasik dari sebuah partai, yaitu fungsi sosialisasi dan pendidikan politik. Gabriel Almond menjelaskan bahwa sosialisasi adalah proses pengajaran nilai-nilai masyarakat, dalam hal ini nilai dan kebudayaan politik. Menurut pandangan Almond, ada dua hal penting yang menarik dalam proses ini, yaitu pertama, kebudayaan politik dan kedua, sosialisasi politik.

Kebudayaan politik meliputi nilai, sikap, dan respon warga negara terhadap kehidupan politik dan pemerintahan. Kebudayaan politik bervariasi sesuai dengan tingkat perkembangan yang dialami masyarakat tersebut, akan tetapi paling tidak terdapat tiga variasi yang bisa diidentifikasi; Pertama, *budaya politik partisipan*,

²⁶ Guillermo O'Donnell dan Philippe C. Schmitter, *Transisi Menuju Demokrasi; Rangkaian Kemungkinan dan Ketidakpastian* (Jakarta: LP3ES, 1993), hlm. 93

yakni masyarakat yang melibatkan diri dalam kegiatan politik, paling tidak dalam kegiatan pemberian suara, dan memperoleh informasi cukup banyak tentang kehidupan politik. Kedua, *budaya politik subyek*, yakni masyarakat yang pasif tunduk pada pejabat pemerintahan dan undang-undang, tetapi tidak melibatkan diri dalam politik. Ketiga, *budaya politik parokial*, yakni masyarakat yang sama sekali tidak menyadari atau mengabaikan adanya pemerintahan dan politik. Mereka ini mungkin buta huruf, apatis, atau tinggal di suatu daerah terpencil.²⁷

Adapun sosialisasi politik, seperti digambarkan Almond di atas, merupakan proses pewarisan dan sekaligus pembentukan nilai dan perilaku politik, karenanya ia berperan mengubah budaya politik yang parokial ke arah yang lebih partisipatif. Sosialisasi politik berjalan baik melalui pola informal, yakni pembentukan nilai sepanjang hidup seseorang dari interaksi dan pengalaman sosialnya, maupun melalui pola formal, yakni program transmisi dan pengajaran yang dilakukan oleh pemerintah, lembaga pendidikan, maupun partai politik. Sedangkan pendidikan politik dalam diskripsi James S. Coleman tidak berbeda dengan sosialisasi politik. Pemakaian istilah sosialisasi politik disebabkan karena konotasi negatif terhadap label pendidikan. Menurutnya pendidikan politik adalah proses di mana individu-individu memperoleh sikap/perasaan terhadap sistem politik dan peranan mereka di dalamnya yang mencakup; *cognition* (apa yang diketahui/dipercayai seseorang tentang sistem politik, eksistensinya, dan modus operandinya), *feeling* (bagaimana perasaan seseorang terhadap sistem politik), dan *sens of political competence* (apa

²⁷ Gabriel A. Almond, *Sosialisasi, Kebudayaan, dan Partisipasi Politik*, dalam Mochtar Mas'ood, *Perbandingan Sistem Politik* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1997), hlm. 35

peranan seseorang dalam sistem politik).²⁸ Dengan demikian, baik Almond maupun Coleman menekankan bahwa pendidikan politik sesungguhnya memiliki dua elemen penting, yaitu sosialisasi dan penguatan nilai-nilai tertentu dalam kebudayaan politik masyarakat serta upaya peningkatan nilai, sikap dan respon warga negara terhadap mekanisme politik dan pemerintahan

Pendidikan politik tidak bertujuan menumbuhkan loyalitas individu pada pemerintah sehingga membenarkan setiap tindakannya, sebaliknya justru membentuk mentalitas kritis sehingga mampu melakukan dialog dan tindakan konstruktif. Di sinilah letak strategis partai politik sebagai elemen penting dari pemerintahan yang demokratis. Partai berkepentingan membangun citra (*image*) bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum, mendapatkan dukungan seluas mungkin, serta menanam solidaritas di antara anggota partai. Selain itu untuk mendidik kesadaran kebangsaan dan kewarganegaraan dari anggota masyarakat. Namun tidak dapat disangkal, pada praktiknya partai lebih mengutamakan kepentingan partai daripada kepentingan nasional sehingga pendidikan lebih diorientasikan untuk kepentingan kepentingan.

Dengan fungsi sosialisasi dan pendidikan politik yang berjalan dengan baik, partai diharapkan mampu mendorong masyarakat mentransformasikan keyakinan ideologis dan politik mereka menjadi kekuatan nyata, karena dalam sistem demokrasi, relasi negara dan masyarakat bersifar sejajar dan saling menguatkan. Masyarakat mampu mengimbangi kekuasaan negara sehingga konsekwensinya setiap keputusan publik yang lahir merupakan akomodasi dari kepentingan negara

²⁸ James S Coleman (ed), *Education and Political Development* (Princeton: Princeton University Press, 1965), hlm. 6

dan masyarakat. Pada proses berikutnya, masyarakat dengan kesadaran politik yang tinggi tersebut akan mampu mendorong terciptanya ruang publik yang bebas dimana setiap individu dan kelompok mempunyai akses sepenuhnya terhadap seluruh perumusan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingannya.

H. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya memudahkan penelitian dan pemaparan beberapa ide pokok yang menjadi landasan keseluruhan penulisan tesis ini, maka penulis menyusunnya ke dalam suatu sistematika pembahasan secara sedemikian rupa. Tesis ini terdiri dari lima bab. Setiap bab terdiri dari beberapa sub-bab dengan kerangka penulisan sebagaimana berikut :

Bab Pertama, adalah pendahuluan. Di dalamnya diuraikan garis besar penulisan, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan perangkat dasar sebagai kerangka pijak penelitian yang akan menjadi landasan bagi bab-bab selanjutnya.

Bab Kedua, menjelaskan setting geografis, sosial, dan politik masyarakat Probolinggo. Bab ini diperlukan sebagai upaya memberikan diskripsi yang memadai mengenai konteks lokasi penelitian sehingga memberikan kontekstualisasi di pembahasan berikutnya.

Bab Ketiga, memaparkan sejumlah temuan yang didapatkan di lapangan menyangkut program model, dan implementasi pendidikan politik PKB DPC Kabupaten Probolinggo. Implementasi yang dimaksud meliputi mekanisme, model, dan media yang digunakan.

Bab Keempat, diorientasikan untuk menganalisis sejumlah problem yang dihadapi, baik internal maupun eksternal, kekuatan dan kelemahan, serta jalan tengah yang ditempuh untuk menyeimbangkan idealisme dan kepentingan praktis partai dalam mengimplementasikan pendidikan politik. Pembahasan juga diarahkan untuk menjelaskan makna pendidikan politik PKB di Probolinggo sebagai bagian dari transformasi politik yang terjadi di NU dan kehidupan Islam Politik di Indonesia, konflik, dinamika, serta eksistensinya pasca reformasi 1998.

Bab Kelima, adalah bagian penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

PKB merupakan salah satu partai Islam pasca reformasi yang memperoleh perhatian luas paling tidak karena dua hal penting, yaitu perolehan suaranya yang signifikan pada Pemilu 1999 dan 2004, berikutnya karena PKB muncul dari basis NU yang merupakan organisasi muslim terbesar di Indonesia. Dalam kasus Kabupaten Probolinggo, PKB merupakan partai terkuat. Daerah ini menjadi *enclave* PKB yang memenangi dua kali Pemilu. Keberhasilan PKB tidak bisa dilepaskan dari struktur sosial dan keagamaan masyarakat Probolinggo yang notabene merupakan pengikut NU yang taat. Namun berbeda dengan NU pada tahun 1940-an s/d 1970-an, ketika menjadi partai politik, yang mengusung agenda kembalinya Piagam Jakarta, penerapan Syari'at Islam dalam kehidupan bernegara dan perjuangan Islam sebagai dasar falsafah kenegaraan, PKB berupaya mensintesis unsur keislaman dan keindonesiaan dalam konteks kenegaraan yang plural serta memberi perhatian terhadap isu-isu sekuler seperti pendidikan politik Paradigma politik PKB yang mencantumkan Pancasila sebagai asas partai dan pengabaianya terhadap agenda formalisasi Islam yang menjadi isu pokok Islam politik sejak perjuangan kemerdekaan hanya akan bisa dipahami dalam konteks transformasi di tubuh NU dan gerakan Islam politik pada umumnya. Penelitian ini menfokuskan diri pada upaya untuk mendapatkan gambaran mengenai model dan implementasi pendidikan politik PKB di Probolinggo sejak

tahun 1998 s/d 2008. Gambaran tersebut kemudian menjadi unit analisis untuk dikaji tidak hanya dalam konfigurasi sosial dan politik PKB di Probolinggo, akan tetapi dalam konteks transformasi NU dan Islam politik pada umumnya. Oleh sebab itu, setelah penulis menela'ah dan menganalisis berbagai hal di atas, maka dihasilkan kesimpulan sebagai berikut;

1. Pendidikan politik dalam devinisi Gabriel Almond dan James S. Coleman memiliki dua elemen penting, yaitu sosialisasi dan penguatan nilai-nilai tertentu dalam kebudayaan politik masyarakat serta upaya peningkatan nilai, sikap dan respon warga negara terhadap mekanisme politik dan pemerintahan. Mengikuti devinsi tersebut, program dan kegiatan praktis PKB di Probolinggo yang bisa diidentifikasi memiliki muatan pendidikan politik terdiri dari enam model, yaitu (1) Kampanye Pemilu dan Pilkada, (2) Pelatihan politik kader dan diskusi publik, (3) Pembentukan organisasi tani dan nelayan, (4) Penghijauan lingkungan, (5) Patronase kyai dan kegiatan keagamaan, dan (6) Pemberdayaan masjid. Enam hal tersebut merupakan model pendidikan politik yang dilakukan PKB di Probolinggo. Enam model itu, secara sengaja maupun tidak, agaknya telah menggambarkan proses pendidikan politik yang terjadi. Meskipun berlangsung secara sporadis dan sangat tergantung pada keterlibatan aktor yang kreatif akan tetapi memiliki makna penting dalam mempengaruhi dinamika politik dan sosial di Probolinggo, dan dalam konteks PKB mampu memperjelas posisi dan peranannya dalam konfigurasi politik dan sosial di Probolinggo pasca reformasi.

2. Enam model pendidikan politik tersebut merupakan implementasi dari platform PKB yang pada tingkat praktis dihadapkan pada sejumlah kendala pokok, baik struktural maupun non-struktural, sehingga memiliki kekuatan dan kelemahan sekaligus. Kendala dan kelemahannya bisa diklasifikasi sebagai berikut, yaitu; pertama, tidak adanya dokumentasi, analisis dan pengelolaan yang profesional terhadap kegiatan partai. Akibatnya, banyak program berjalan secara sporadis, temporer dan cenderung tidak efisien. Kedua, minimnya kader profesional di PKB sehingga partai kesulitan dalam menginstitutionalisasi berbagai program pendidikan politik yang sejatinya bermakna strategis. Profesional tersebut bisa berarti kurangnya kader PKB yang matang dalam berpolitik, atau seperti tesis Herbeth Feith lebih berfungsi sebagai penggalang massa daripada administrator. Bisa juga berarti kurangnya kader yang berasal dari profesi tertentu, seperti pengacara, dokter, hakim, insinyur dan sebagainya. Kesulitan untuk melakukan pelebagaan juga disebabkan konflik yang terus menerus melanda internal partai. Ketiga, ketergantungan terhadap aktor karena tidak cukup berhasil membangun infrastruktur partai. Keempat, kader PKB cenderung tidak memperhatikan pentingnya membangun koalisi dengan beberapa kelompok strategis seperti komunitas Tionghoa, yang secara ekonomi dan politik memainkan peranan penting. Kelima, munculnya kecenderungan oligarki, yaitu memunculkan program semata-mata demi kepentingan jangka pendek partai, tanpa memperhatikan aspirasi dan kebutuhan konstituen, nilai ideologis partai, dan sebagainya. Beberapa hal tersebut merupakan kendala yang dihadapi PKB

Probolinggo dalam mengimplementasikan program pendidikan politik terhadap konstituen maupun masyarakat luas. Namun bukan berarti bahwa pendidikan politik yang telah dilaksanakan sepanjang pendirian PKB tahun 1999 sampai dengan 2008, ketika penelitian ini dilakukan, kehilangan relevansinya dengan dinamika sosial dan politik di Probolinggo. Relevansi dari program pendidikan politik yang dilakukan PKB dapat diuraikan sebagai berikut, yaitu; pertama, sebagai elemen yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas demokrasi dengan mengupayakan politik tanpa kekerasan. Kedua, menjadi elemen yang mendorong tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat Probolinggo terhadap proses politik dan pemerintahan. Ketiga, sebagai kekuatan yang berupaya mewujudkan wajah Islam yang *rahmatan lil 'alamin*. Sedangkan yang keempat, pendidikan politik PKB berfungsi sebagai elemen yang memberikan kontekstualisasi terhadap iklim keterbukaan serta dalam batas-batas tertentu melakukan transformasi terhadap politik kepartaian.

3. Perhatian PKB terhadap isu-isu sekuler seperti pendidikan politik dan pengabaian terhadap isu formalisasi Islam dalam kehidupan kenegaraan yang merupakan agenda politik NU pada tahun 1940-an s/d 1970-an, ketika berkiprah dalam politik praktis, mengindikasikan adanya transformasi politik NU dan Islam politik di Indonesia pada umumnya. PKB secara resmi muncul dari PBNU dan didukung oleh basis yang relatif mengalami transformasi pada dua dasawarsa sebelumnya sehingga menentukan model partai yang dipilih. Dalam konteks ini, muncul pemikiran baru yang berpandangan bahwa Islam

tidak perlu diterapkan secara formal dalam masalah kenegaraan, akan tetapi Islam harus berperan pada wilayah yang lebih substansial dalam kehidupan sosial sehari-hari. Dengan begitu, Pancasila dan konsep negara yang pluralistik harus diterima sebagai sesuatu yang final. Karenanya, sejak awal PKB menegaskan visi kebangsaan dan nasionalisme-nya sehingga terbuka bagi seluruh komponen. Berbeda dengan beberapa partai Islam lainnya, PKB memilih Pancasila sebagai asas partai dan menerima NKRI sebagai bentuk final kenegaraan. Hal ini kemudian diaplikasikan dalam tujuan dan program PKB yang sudah tidak mempersoalkan Piagam Jakarta, penerapan Syari'at Islam dalam kehidupan bernegara dan perjuangan Islam sebagai dasar falsafah kenegaraan, tetapi memberi perhatian terhadap isu-isu sekuler, seperti pendidikan, pemberantasan korupsi, penegakan hukum dan pengentasan kemiskinan. Fenomena tersebut memiliki paralelitas dengan perubahan di tubuh NU sejak tahun 1980-an, akan tetapi sulit dibayangkan akan terjadi pada tahun 1940-an s. Dukungan final NU/PKB terhadap NKRI, tidak saja untuk mengimbangi gerakan formalisasi Islam yang bukan lagi merupakan agenda utama Islam politik, melainkan untuk menentang gerakan separatis yang bermunculan pasca reformasi dan ingin memisahkan diri dari NKRI. Penting ditegaskan, kemuculan PKB sebagai salah satu partai Islam dalam perpolitikan di Indonesia menunjukkan pergeseran paradigma politik NU, yang juga berarti pergeseran paradigma Islam politik. Islam politik pasca reformasi relatif tidak mempermasalahkan posisi formal Islam dalam NKRI, suatu fenomena yang belum pernah terjadi dalam sejarah perpolitikan di tanah air. Dengan

demikian, pendidikan politik PKB di Probolinggo yang sifatnya lokal tidak hanya dinilai kekuatan dan kekurangannya dalam mempengaruhi kesadaran dan relasi antara warga masyarakat dan negara, akan tetapi bisa dibaca dalam konteks transformasi politik di tubuh NU. Demikian juga, lebih jauh relevan untuk dianalisis dalam konteks dialektika antara Islam politik dan negara.

B. Saran-Saran

1. Penelitian ini hanyalah sebagian kecil dari sekian banyak hasil penelitian tentang PKB, namun penelitian ini menfokuskan diri pada program dan model pendidikan politik PKB di Probolinggo yang kemudian dianalisis dalam tiga konteks, yaitu konteks relasi politik dan sosial di Probolinggo, konteks transformasi di NU dan transformasi Islam politik pasca reformasi. Meskipun demikian, penelitian-penelitian lanjutan tentang PKB penting dilakukan karena perubahan kondisi internalnya maupun pergeseran posisinya dalam konfigurasi politik yang cepat berubah. Pemahaman mengenai eksistensi PKB, baik sebagai partai Islam maupun sebagai partai nasional pada umumnya, sangat diperlukan karena sedikit banyak akan mempengaruhi dunia kepartaian di Indonesia.
2. Hasil penelitian yang sederhana ini diharapkan akan menambah perbendaharaan ilmiah dan inspirasi bagi munculnya penelitian-penelitian baru yang lebih mendalam, terutama kajian mengenai Islam politik pasca reformasi yang masih harus terus dilakukan. Penelitian mengenai Islam politik umumnya dilakukan pada tingkat nasional, menyangkut dinamika yang terjadi di tingkat elit dan masih sedikit yang mengkaji dinamika Islam politik di

tingkat lokal. Di sisi lain penelitian tentang Islam politik umumnya berangkat dari perpektif yang oposisional antara negara dan Islam, dan masih sedikit penelitian dengan perspektif yang lebih dialektis sehingga mampu menangkap artikulasinya yang baru dan berubah terus menerus. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi rekomendasi bagi pengkaji politik Islam, pemerintah, pemimpin partai, generasi muda, mahasiswa, masyarakat, dan lain sebagainya untuk memahami persoalan Islam politik dengan baik, yang pada gilirannya akan memunculkan sikap dan respon yang produktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufiq, *Islam dan Masyarakat; Pantulan Sejarah Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1987).
- Almond, Gabriel A., *Sosislisasi, Kebudayaan, dan Partisipasi Politik*, dalam Mochtar Mas'oeed, *Perbandingan Sistem Politik* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1997).
- Amir, Zainal Abidin, *Peta Islam Politik Pasca Soeharto* (Jakarta: LP3ES, 2003).
- Anam, Khoirul, *Kontroversi Penegakan Syari'at Islam di Indonesia Menurut Partai-Partai Islam; Studi Komparatif Tentang Perbedaan Konsep Penegakan Syari'at Islam di Indonesia Menurut PKB dan PKS* (Yogyakarta: Tesis Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2006).
- Appadurai, Arjun, *Modernity at Large; Cultural Dimensions of Globalization* (London: University of Minnesota Press, 2003)
- Asmawi, *PKB: Jendela Politik Gus Dur* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1999).
- Asyari, Suaidi, *Nalar Politik NU dan Muhammadiyah* (Yogyakarta: LKiS, 2009)
- Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Penerangan Pemerintah Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Probolinggo Jawa Timur, 2007.
- Barton, Greg, *Biografi Gus Dur* (Yogyakarta: LKiS, 2003).
- Benda, Harry J., *Bulan Sabit dan Matahari Terbit; Islam Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1980).
- Bruinessen, Martin Van, *NU; Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, dan Pencarian Wacana Baru* (Yogyakarta: LKiS, 1999).
- Coleman, James S (ed), *Education and Political Development* (Princeton: Princeton University Press, 1965).
- Dhakidae, Daniel, *Partai-Partai Politik, Demokrasi, dan Oligarki*, dalam Litbang Kompas, *Partai-Partai Politik Indonesia; Ideologi dan Program 2004-2009* (Jakarta: Kompas, 2004).
- , *Partai-Partai Politik Indonesia; Kisah Pergerakan dan Organisasi dalam Patahan-Patahan Sejarah*, dalam Litbang Kompas, *Partai-Partai Politik Indonesia; Ideologi, Strategi dan Program* (Jakarta: Kompas, 1999).

- Dhofier, Zamakhsyari *Tradisi, Pesantren* (Jakarta: LP3ES, 1982).
- Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Depag RI, *Education Manajemen Information System (EMIS); Laporan Statistik EMIS Th. Pelajaran 2006/2007* (Jakarta: tnp, 2007).
- Duverger, Maurice, *Sosiologi Politik*, terj. Daniel Dhakidae (Jakarta: Rajawali Press, 2002).
- Edy, Muhammad Lukman, *Reformulasi Gerakan PKB* (Yogyakarta: DPP PKB, Iskandarsyah Institute, KLIK.R, 2006).
- Effendi, Bahtiar, *Islam dan Negara; Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1998).
- Evans, Kevin Raymond, *Sejarah Pemilu dan Partai Politik di Indonesia* (Jakarta: Arise Consultancies, 2003).
- Fealy, Greg, *Ijtihad Politik Ulama; Sejarah NU 1952-1967* (Yogyakarta: LKiS, 2003).
- Feillard, Andre, *NU Vis-à-Vis Negara* (Yogyakarta: LKiS, 1999).
- Haidar, M. Ali, *Nahdatul Ulama dan Islam di Indonesia; Pendekatan Fikih dalam Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998).
- Hefner, Robert, *Civil Islam; Islam dan Demokratisasi di Indonesia* (Jakarta: ISAI, 2001).
- , *Geger Tengger; Perubahan Sosial dan Perkelahian Politik* (Yogyakarta: LKiS, 1999).
- Humaidi, Zuhri, *Islam Politik dan Nasionalisme; Memahami Politik Indonesia Pasca Orde Baru*, Kertas Kerja dalam *The First Internasional Graduate Student Conference on Indonesia* (IGSC) tanggal 1-2 Desember 2009, Sekolah Pascasarjana UGM Yogyakarta.
- Hermawan, Eman, dkk, *Partai Advokasi; Wacana Keberpihakan dan Gerakan* (Yogyakarta: DPP PKB dan KLIK.R, 2004).
- Ismail, Faisal, *Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama; Wacana Ketegangan Kreatif Islam dan Pancasila* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999).
- Jackson, Karl D. dan Lucien W. Pye (ed), *Political Power and Communication in Indonesia* (Berkeley: University of California Press, 1978).

- Karim, Rusli, *Negara dan Peminggiran Islam Politik* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999)
- Koiruddin, *Menuju Partai Advokasi* (Yogyakarta: LKiS, 2005).
- , *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).
- Kuntowijoyo, *Paradigma Islam; Interpretasi untuk Aksi* (Bandung: Mizan, 1991)
- Lay, Cornelis, *Involusi Politik; Esei-Esei Transisi Indonesia* (Yogyakarta: PLOD, 2006).
- Liddle, William, *The 1977 Election and New Order Legitimacy*, dalam Leo Suryadinata, *Southeast Asia Affairs 1978* (Singapore: ISE AS, 1972).
- Lisa Harrison, *Metodologi Penelitian Politik*, terj. Tri Wibowo (Jakarta: Kencana, 2007).
- Litbang Kompas, *Partai-Partai Politik Indonesia; Ideologi dan Program 2004-2009* (Jakarta: Kompas, 2004).
- Maarif, Ahmad Syafii, *Islam dan Masalah Kenegaraan; Studi tentang Percaturan dalam Konstituante* (Jakarta: LP3ES, 1987).
- Macridis, Roy C., "Sejarah, Fungsi, dan Tipologi Partai-Partai", dalam Ichlasul Amal, *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1996).
- Mehden, Fred R. Von der, *Religion and Nasionalism in Southheast Asia; Burma, Indonesia, the Philippines* (Madison: The University of Wisconsin Press, 1968)
- Miriam Budiarto, *Partisipasi dan Partai Politik* (Jakarta: Gramedia, 1981).
- Muhtadi, Asep Saiful, *Komunikasi Politik Nahdlatul Ulama* (Jakarta: LP3ES, 2004).
- Mulkhan, Abdul Munir, *Runtuhnya Mitos Politik Santri* (Yogyakarta: SIPRESS, 1994).
- Musyarrofa, Ita, *Praktek Poligami Kyai Pesantren di Probolinggo Jawa Timur; Studi Atas Efektifitas Ketentuan Poligami dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974* (Yogyakarta: Tesis Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2004).

- Nadhif, Alawi (ed), *PKB dan Pemilu 2004* (Jakarta: LPP DPP PKB, 2003).
- Noer, Deliar, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942* (Jakarta: LP3ES, 1988)
- O'Donnel, Guillermo dan Philippe C. Schmitter, *Transisi Menuju Demokrasi; Rangkaian Kemungkinan dan Ketidakpastian* (Jakarta: LP3ES, 1993).
- Rhodes, R.A.W, *Theory and Methods in Political Science*, edited by David Mars and Gerry Stoker (tth).
- Romli, Lili, *Partai Islam dan Pemilu Islam di Indonesia*, Jurnal Penelitian Politik, Vol. 1 No. 1, 2004.
- Rush, Michael dan Phillip Althoff, *Pengantar Sosiologi Politik* (Jakarta: Rajawali press, 1997).
- Salim, Hairus, dkk, *Tujuh Mesin Pendulang Suara* (Yogyakarta: LKiS, 1999).
- Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Grasindo, 1999).
- Tim KPU, *laporan PEMILUKADA Kabupaten Probolinggo Tahun 2008* (Probolinggo: KPU, 2008).
- Voll, John O., *Politik Islam; Kelangsungan dan Perubahan di Dunia Modern* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997)
- Weiner, Myron dan Josep La Palombara, *Pengaruh Partai terhadap Perkembangan Politik*, dalam Miriam Budiarjo (ed), *Partisipasi dan Partai Politik* (Jakarta: Gramedia, 1981).

Dokumen Partai

- DPP PKB, *Dokumen Muktamar Luar Biasa PKB*, Yogyakarta 17-19 Januari 2002.
- DPP PKB, *Hasil-Hasil Mukernas, Munas Alim Ulama', Muspim dan Rakornas Dewan Syura*, Jakarta, 2002.
- DPW JATIM, *Program DPW JATIM Tahun 2007*, Surabaya, 2007.
- Hasil Mukernas II PKB, 15-16 Februari 2000
- Panitia Deklarasi DPP PKB, *Menyambut Deklarasi Partai Kebangkitan Bangsa*, Jakarta, 1998
- Platform Partai Kebangkitan Bangsa.

CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Zuhri Humaidi, S.H.I
Tempat, Tgl. lahir : Probolinggo, 29 Juli 1982
Agama : Islam
Nama Orangtua :
Ayah : Syafi'uddin
Ibu : Muddayati
Pekerjaan Orangtua : Guru
Alamat Rumah : Taman II, Rt.09 Rw.03 Besuk Agung-Besuk, Probolinggo
Alamat Yogya : Gowok No. 321 Rt. 14 Rw. 06 Depok Sleman, Yogyakarta
HP : 081 578999567
e-mail : kenhumaidie@yahoo.co.id

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN;

1988 - 1994 : Madrasah Ibtidaiyyah Raudlatus Salam, Besuk.
1994 – 1997 : Madrasah Tsanawiyah Darullughah wal Karomah, Kraksaan.
1997 – 2000 : Madrasah Aliyah Darullughah wal Karomah, Kraksaan.
2000 – 2006 : Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

PENGALAMAN ORGANISASI/KERJA

2001 – 2006 : Koordinator Litbang Lembaga “Lintas Studi Transformatif”
(elSTra), Yogyakarta
2003 – 2005 : Ketua BEM Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga
2003 - 2004 : Staf Litbang PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia)
Komisariat UIN Sunan kalijaga Yogayakarta
2004 – 2005 : Redaktur Jurnal “Madzhabuna” UIN Sunan Kalijaga
2006 – 2009 : Pendiri dan Pengurus IKMP (Ikatan Mahasiswa Pascasarjana)
UIN Sunan Kalijaga
2009 – 2011 : Pengurus FWI (Forum Mahasiswa Pascasarjana se-Indonesia),
bidang Riset dan Kerjasama

PUBLIKASI

- 1) “*Syari’ah Dan HAM; Upaya Penyatuan Dan Perbandingan*”, Jurnal Madzhabuna Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 02, Juni 2003.
- 2) “*Elaborasi Awal Tentang Fiqh Multikultural*”, Jurnal Madzhabuna Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 03, Mei 2005.
- 3) “*Guratan Realitas Seorang Satrawan*”, Harian Kompas, Sabtu 21 November 2002.
- 4) “*Potret Perjalanan Seorang Seniman Kridjomuljo*”, Ruang Baca Koran Tempo, Minggu 12 Februari 2002.
- 5) Editor buku “*Lebih baik tidak sekolah*”, karya Sudjono Samba, Penerbit LKiS Yogyakarta, tahun 2006
- 6) Editor buku “*Rekam Jejak Dokter Pejuang*”, karya Nashruddin Anshory, Penerbit LKiS Yogyakarta, tahun 2008
- 7) “*Fiqh dan Lokalitas dalam Perspektif Multikulturalisme*”, Kertas kerja dalam ACIS 2008 (Annual Conference on Islamic Studies) 3-6 November 2008 di Palembang, dimuat kembali dalam Jurnal Tashwirul Afkar, edisi 26 tahun 2008.
- 8) Penyunting dan kontributor buku “*Percikan Pemikiran untuk Indonesia Baru*”, kumpulan hasil-hasil seminar mahasiswa pascasarjana se-Indonesia, penerbit FWI kerjasama dengan Depdiknas RI dan Jurnal Paradigma UGM, tahun 2009.
- 9) “*Globalisasi dan Implikasinya terhadap Kehidupan Ekologis di Indonesia*”, Kertas kerja dalam Simposium Nasional II FWI, 18–21 November 2009 di Jakarta.
- 10) “*Islam Politik dan Nasionalisme; Memahami Politik Indonesia Pasca Orde Baru*”, Kertas Kerja dalam *The First Internasional Graduate Student Conference on Indonesia* (IGSC) tanggal 1-2 Desember 2009, Sekolah Pascasarjana UGM Yogyakarta.
- 11) “*Gender, Gerakan Feminisme dan Peranan Media*”, Jurnal An-Nisa’, Volume 2 No 2 Oktober 2009, Pusat Studi Gender STAIN Jember.